

**STANDAR AKUNTANSI SYARI'AH**  
**(Paradigma Baru Sistem Akuntansi Di Indonesia)**

**Hardiwinoto**

**Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang**

**Abstrak**

Munculnya lembaga keuangan berbasis syari'ah maupun semi syari'ah tak terbendung lagi. Bahkan bank-bank yang telah mapan sekalipun ikut menciptakan produk berbasis syariah, seperti BNI, Mandiri, BRI disamping Bank Mu'amalat dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, kemudian lembaga ekonomi mikro yang bernama BMT (Baitul Mal Wattamwil).

Dengan tuntutan kebutuhan akan adanya standar akuntansi yang berbasis syari'ah, maka proses penyusunan PSAK tentang standar akuntansi syari'ah telah dimulai Agustus 1999, Publik Hearing 29 Agustus 2001, kemudian disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada 1 Mei 2002, kemudian berlaku sejak 1 Januari 2003. (Media Akuntansi. Edisi, 27 / Juli-Agustus / Tahun IX / 2002, hal. 29)

Sementara ini standar akuntansi yang ada adalah adopsi dari negara-negara kapitalis, akibatnya standar-standar tersebut sebagian kalangan menganggap bertentangan dengan kondisi negara berkembang khususnya nilai-nilai Islam. Karena ada beberapa nilai yang dianggap bertentangan dengan syari'at Islam tapi sudah berterima umum.

**Kata Kunci :** Standar, Akuntansi, Syariah

**PENDAHULUAN**

Munculnya lembaga keuangan berbasis syari'ah maupun semi syari'ah tak terbendung lagi. Bahkan bank-bank yang telah mapan sekalipun ikut menciptakan produk berbasis syariah, seperti BNI, Mandiri, BRI disamping Bank Mu'amalat dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, kemudian lembaga ekonomi mikro yang bernama BMT (Baitul Mal Wattamwil).

Dengan tuntutan kebutuhan akan adanya standar akuntansi yang berbasis syari'ah, maka proses penyusunan PSAK tentang standar akuntansi syari'ah telah dimulai Agustus 1999, Publik Hearing 29 Agustus 2001, kemudian disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada 1 Mei 2002, kemudian berlaku sejak 1 Januari 2003. (Media Akuntansi. Edisi, 27 / Juli-Agustus / Tahun IX / 2002, hal. 29)

Sementara ini standar akuntansi yang ada adalah adopsi dari negara-negara kapitalis, akibatnya standar-standar tersebut sebagian kalangan menganggap bertentangan dengan kondisi negara berkembang khususnya nilai-nilai Islam. Karena ada beberapa nilai yang dianggap bertentangan dengan syari'at Islam tapi sudah berterima umum.

## **STANDAR AKUNTANSI**

Ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi:

1. Definisi elemen laporan keuangan.

Standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi yang terjadi harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan, atau biaya.

2. Pengukuran dan penilaian pedoman.

Digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik dari saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca)

3. Pengakuan

Kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan agar dapat disajikan dalam laporan keuangan.

4. Pengungkapan (*disclosure*)

Digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tentang perusahaan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Keempat hal tersebut oleh negara-negara barat dipecah bahwa standar akuntansi akan meningkatkan daya banding laporan keuangan secara internasional, dapat menghemat biaya terutama bagi penyaji laporan keuangan dan memperbaiki standar akuntansi nasional masing-masing negara (Turner, 1983 dalam Chariri, 1996).

Sebagai respon akan kebutuhan standar akuntansi, berbagai upaya telah dilakukan oleh negara kapitalis. Salah satunya adalah dengan dibentuknya IASC pada tahun 1973, jumlah kenggotaan IASC sampai sekarang meliputi lebih dari 100 organisasi profesi akuntansi dan sekitar 80 negara, termasuk Indonesia. Tujuan utama IASC adalah memformulasikan standar akuntansi yang dapat diterapkan secara internasional. Sampai sekarang IASC telah mengeluarkan 31 standar akuntansi. Meskipun IASC berhak untuk menetapkan dan

mengeluarkan standar akuntansi, tetapi badan tersebut tidak memiliki hukum untuk memaksakan penerapan standar akuntansi yang dihasilkan.

## **SISTEM AKUNTANSI DENGAN NILAI AL QUR'AN**

Kapitalisme telah merambah dan menjerat ke seluruh penjuru kehidupan manusia. Perilaku kita secara sadar atau tidak berada dalam pengaruh kapitalisme. Akuntansi modern yang dikatakan akuntansi Anglo Saxon tidak terlepas dari pengaruhnya untuk lebih memperkokoh kekuatan kapitalisme.

Wajah akuntansi yang dibentuk oleh kapitalisme mendistorsi informasi bagi para penggunanya untuk melakukan keputusan dan aktivitas ekonomi. Karena sering kita temui aspek pengakuan terjadi sebelum kenyataan terjadi yaitu lebih *berbasis akrual* (kejadian yang belum riil, seperti pendapatan bunga) dari pada *berbasis kas* (kejadian riil).

Model Anglo Saxon menganut paham diakuinya nilai waktu dalam uang. Hal ini disebabkan konsep tersebut sama artinya dengan riba. Padahal riba dilarang dalam ajaran Islam karena riba menunjukkan ketidakadilan, ketidakadilan itu timbul karena distribusi keuntungan yang didasarkan pada jumlah yang tetap, sehingga dapat merusak mekanisme harga dan menyebabkan alokasi sumber ekonomi yang mengarah pada penunpukan modal yang terpusat pada sekelompok orang tertentu (Chapra, 1994). Model Anglo saxon jelas memisahkan akuntansi ekonomi dari substansi ekonominya. Yaitu transaksi dapat diakui dalam laporan keuangan meskipun secara yuridis tidak boleh diakui.

## **STANDAR AKUNTANSI ISLAM**

Dalam Al'qur'an surat Al Baqarah ayat 282-283 berkaitan dengan proses catat mencatat (akuntansi) dalam kegiatan bisnis. Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia agar kegiatan bisnis dilakukan sesuai dengan konsep kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Senada dengan ayat tersebut, Scott yang dikutip oleh Salmonson (1969) menyarankan bahwa keadilan, kebenaran dan kejujuran adalah pernyataan umum yang mengkaitkan aturan dan prosedur akuntansi dengan konsep sosial. Lebih lanjut Scott berpendapat bahwa akuntansi akan berubah karena perubahan kondisi lingkungan tetapi bukan berubah secara *arbiter* hanya karena dimaksudkan untuk memenuhi tujuan yang menguntungkan pihak tertentu saja.

Pada dasarnya kondisi lingkungan yang sebenarnya menentukan jenis dan isi standar akuntansi. Kebutuhan akan standar akuntansi yang bercirikan Islam merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi Islam. Munculnya kembali pemikiran-pemikiran tentang ekonomi Islam makin meningkatkan persatuan sesama muslim dalam kegiatan politik dan ekonomi dapat dikatakan sebagai kekuatan baru perkembangan ekonomi di negara-negara Islam (termasuk Indonesia).

Perkembangan tersebut mengarah pada penciptaan lingkungan ekonomi dan pasar yang seragam sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akibatnya pelaporan keuangan perusahaan di negara-negara Islam akan ditandai dengan kekuatan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda dengan negara-negara barat. Oleh karena kekuatan tersebut mempengaruhi tujuan dan format pelaporan keuangan, kebutuhan untuk memiliki standar akuntansi yang bernapaskan Islam merupakan suatu keharusan langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun standar akuntansi Islam.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Membentuk dan mempraktekan sistem ekonomi Islam sehingga mempengaruhi tujuan laporan keuangan yang berkaitan dengan standar akuntansi.
2. Laporan keuangan yang dihasilkan harus mampu meyakinkan pemakai laporan bahwa perusahaan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Karim, 1990).
3. Kualitas informasi yang dihasilkan relevan dan dapat diuji kebenarannya, tepat waktu dan karakteristik lain seperti yang diterapkan di negara barat yang konsisten dengan tiga hal pokok yaitu: Keadilan, kebenaran, dan kejujuran.
4. Kriteria pangakuan untuk masing-masing elemen pelaporan keuangan disajikan sesuai dengan syariat Islam.

Wacana Akuntansi Syari'ah walau masih dalam tatanan konsep tapi sudah bisa digunakan untuk berbagai aktivitas ekonomi. Dan seterusnya dapat menjadi tatanan yang lebih praktis.

## **PSAK NO. 59**

Untuk memenuhi kebutuhan akan standar Akuntansi Syariah, karena tuntutan pasar sudah mendesak maka IAI sejak 1 Mei 2002 telah mengesahkan PSAK no. 59 tentang perbankan syari'ah. Hal ini dapat menjadi awalan yang bagus untuk menstandarisasi lembaga keuangan syari'ah yang selama ini sudah berjalan. Jika demikian mungkin kasus PT. QSAR (kerjasama modal dengan model bagi hasil) tidak menjadi separah yang dalam hal ini dimungkinkan tidak ada laporan keuangan yang memadai. Padahal dalam kasus QSAR sebenarnya dapat diselesaikan dengan beberapa point dari apa yang ada di PSAK no. 59 sebagai berikut:

Dalam PSAK no. 59 **point 7** tentang pengakuan dan pengukuran *Mudharabah* (bagi hasil) disebutkan bahwa *Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.* Kemudian pada **point 13** disebutkan bahwa *Pada prinsipnya, dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.* Lalu dalam **point 27** disebutkan bahwa *Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.* Diperkuat lagi dalam **point 38** untuk masalah Musyarakah (kerjasama modal lebih dari 2 orang atau banyak orang yang bercampur) yang menyebutkan bahwa *Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.* Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: *pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.* Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

## **PENUTUP**

Standar Akuntansi Islam (Syari'ah) menawarkan sistem ini untuk menghindari kenyataan sejarah perekonomian dalam kegoncangan fluktuasi nilai uang yang tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya akibat perilaku spekulasi. Dimana uang tidak menjadi fungsi aslinya sebagai alat tukar melainkan menjadi komoditas tersendiri. Hal tersebut menyebabkan laju suku bunga riil yang tinggi dan fluktuasi valuta asing yang tidak sehat (*Umar Chapra, 2000, Sistem Moneter Islam*).

Islam lahir sebagai tanggapan atas suatu kondisi historis dan adanya kebutuhan akan petunjuk hidup yang komprehensif dalam bidang religio kultural dan sosio ekonomi (*Asghar Ali Engineer, 2000, Islam dan Teologi Pembebasan*). Dengan demikian petunjuk Islam atau termasuk seperangkat metodologinya (*syari'ahnya*).

Standar akuntansi syari'ah mempunyai pengaruh positif terhadap praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga suatu keharusan bagi muslim untuk mengembangkan sendiri standar akuntansi yang sesuai dengan Syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asghar Ali Engineer, 2000, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Abdel-Magid, Moustafa F, 1981, The Theory of Islamic Banking: Accounting Implications, *The International Journal of Accounting Educations Research*.
- Chapra, Muhammad Umar, 1994, The Prohibition of Riba in Islam: An Evaluation of Some Objections, *American Journal of Islamic Social Sciencis*.  
(*Umar Chapra, 2000, Sistem Moneter Islam*).
- Chapra, Muhammad Umar, 2000, *Sistem Moneter Islam*, Tazkia, Jakarta .
- Karim, Rifaat AA, 1990, Standard Setting for The Financial Strategy of Islamic Bank, *Journal Business Finance and Accounting*.
- Media Akuntansi. Edisi, 27 / Juli-Agustus / Tahun IX / 2002.
- PSAK No. 59, 2002, IAI.
- Scott, W. Richard, 1992, *Organization: Rational, Natural, and Open System*, 3<sup>rd</sup>, Englewood Cliffee, Prentice-hall Inc.
- Triuwono, Iwan, 2000, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*.